KEBIJAKAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Ratna Eni[1], Kasful Anwar Us[2]

[1,2]*Islam Institut Islam Ma'arif Jambi*
E-mail : ratnaeni69jbi@gmail.com[1], kasfulanwarus@uinjambi.ac.id[2]

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan pemahaman keagamaan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di SMP serta mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu mengkaji berbagai sumber seperti peraturan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di SMP telah diatur melalui kurikulum nasional, penguatan pendidikan karakter, serta kebijakan pengembangan nilai-nilai religius di lingkungan sekolah. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif, minimnya sarana dan media pembelajaran yang mendukung, kurangnya alokasi waktu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, serta rendahnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membina karakter keagamaan peserta didik. Problematika tersebut berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan pendidikan Islam dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, penguatan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, serta kerja sama yang lebih intensif antara sekolah dan orang tua. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di SMP dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan Islam, Problematika Pendidikan Islam, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Agama Islam.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, moral, serta spiritual sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki posisi yang strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat SMP merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keislaman, membangun karakter religius, serta membimbing peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan PAI di sekolah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan akhlak mulia (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di sekolah, salah satunya melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menyesuaikan karakteristik sekolah, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kurikulum Merdeka menekankan penguatan karakter melalui dimensi Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep keagamaan, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasi pendidikan Islam di tingkat SMP masih menghadapi berbagai problematika. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif, minimnya sarana dan prasarana pembelajaran, rendahnya motivasi belajar peserta didik, pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi, serta kurang optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membina karakter keagamaan peserta didik (Suyitno, 2021). Selain itu, perkembangan era digital juga membawa tantangan baru berupa mudahnya akses terhadap informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga memerlukan penguatan pendidikan karakter secara berkelanjutan (Marzuki, 2022).

Problematika tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat sekolah. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut mampu berperan sebagai pendidik, pembimbing, teladan, sekaligus inovator dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Di sisi lain, dukungan kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pembentukan karakter Islami peserta didik (Aini & Huda, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kebijakan dan problematika pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam di tingkat SMP sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena atau permasalahan penelitian (Zed, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis berbagai kebijakan serta problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, serta Keputusan Menteri Agama tentang implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding, serta dokumen ilmiah lainnya yang membahas kebijakan pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, pengembangan kurikulum, dan berbagai permasalahan dalam implementasinya (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mengelompokkan, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar, implementasi kebijakan, problematika yang dihadapi, serta alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menelaah isi berbagai dokumen dan literatur secara kritis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan dan problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang telah dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dengan berbagai tantangan implementasinya di lapangan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kebijakan, problematika, dan upaya penguatan pendidikan Islam di Sekolah Dasar (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Melalui metode studi kepustakaan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar, berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah, sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan, termasuk di SMP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Dalam implementasinya, pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Salah satu kebijakan yang saat ini diterapkan adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyusun pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah. Guru tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi semata, tetapi lebih menekankan pembelajaran yang aktif, kontekstual, serta berpusat pada peserta didik. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik mampu memahami ajaran Islam sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Selain Kurikulum Merdeka, kebijakan pendidikan Islam juga diarahkan pada penguatan pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai agama dalam seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah. Pendidikan Agama Islam tidak hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi juga diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, kegiatan keagamaan, budaya sekolah yang religius, serta keteladanan guru dan tenaga kependidikan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang religius, disiplin, jujur, bertanggung jawab, toleran, dan memiliki kepedulian sosial (Marzuki, 2022).

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam melalui berbagai program pelatihan, pengembangan profesi berkelanjutan, komunitas belajar guru, serta penyediaan berbagai platform digital pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan agar guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan teknologi digital, dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 (Suyitno, 2021).

Kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan serangkaian aturan, program, dan strategi yang disusun oleh pemerintah untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Agama Islam (PAI) secara efektif sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga peserta didik menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Landasan utama kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003). Selanjutnya, Pasal 37 menegaskan bahwa Pendidikan Agama merupakan mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan **Kurikulum Merdeka** sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam tidak lagi hanya menekankan aspek hafalan materi, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, dan pembentukan karakter religius. Guru diberikan keleluasaan untuk memilih metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Kebijakan berikutnya adalah penguatan **Profil Pelajar Pancasila** yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran PAI. Melalui kebijakan ini, peserta didik diarahkan menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut ke dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Selain melalui kurikulum, kebijakan pendidikan Islam juga diwujudkan dalam pembentukan **budaya sekolah religius (religious school culture)**. Budaya religius merupakan serangkaian pembiasaan yang dilakukan secara konsisten sehingga nilai-nilai agama menjadi bagian dari kehidupan warga sekolah. Pembiasaan tersebut meliputi membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai, melaksanakan salat Dhuha berjamaah, salat Zuhur berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, membiasakan salam, senyum, dan sapa (3S), menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bagian dari ajaran Islam, serta melaksanakan kegiatan sosial seperti infak Jumat dan bakti sosial. Menurut Marzuki (2022), budaya religius di sekolah merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menanamkan pendidikan karakter karena peserta didik belajar melalui keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus.

Pemerintah juga mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam. Guru didorong mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, workshop pembelajaran berbasis teknologi, serta kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman (Suyitno, 2021).

Contoh Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di SMP

Sebagai contoh, **SMP Negeri** yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka mengintegrasikan Pendidikan Agama Islam dengan kegiatan **Projek Penguatan Profil Pelajar**

Pancasila (P5). Guru PAI mengajak peserta didik melaksanakan proyek sosial berupa penggalangan infak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya mempelajari materi tentang sedekah dan kepedulian sosial, tetapi juga mempraktikkan langsung nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Kegiatan ini mampu menumbuhkan sikap empati, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Contoh lain dapat dilihat pada pelaksanaan **program pembiasaan religius** di sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, seluruh peserta didik membaca doa bersama dan tadarus Al-Qur'an selama 10–15 menit. Pada waktu Zuhur, peserta didik bersama guru melaksanakan salat berjamaah di musala sekolah. Setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan kultum (kuliah tujuh menit), infak Jumat, dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dibiasakan untuk mengamalkan ajaran Islam secara nyata sehingga nilai-nilai agama tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari (Aini & Huda, 2023).

Selain itu, guru Pendidikan Agama Islam memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, aplikasi kuis interaktif, serta platform pembelajaran daring. Misalnya, saat membahas materi tentang toleransi dalam Islam, guru menayangkan video mengenai pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, kemudian peserta didik berdiskusi secara kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih menarik, meningkatkan partisipasi peserta didik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi (Marzuki, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama tidak hanya diwujudkan melalui regulasi pemerintah, tetapi juga melalui implementasi kurikulum, pembiasaan budaya religius, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Apabila kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka tujuan pendidikan Islam dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman dapat tercapai secara optimal.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMP menunjukkan adanya berbagai bentuk pengembangan pembelajaran yang lebih inovatif dibandingkan sebelumnya. Guru mulai menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), diskusi kelompok, presentasi, pembelajaran kolaboratif, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan keaktifan peserta didik sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Implementasi pendidikan Islam juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembiasaan religius, seperti membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai, salat Dhuha berjamaah, salat Zuhur berjamaah, peringatan hari besar Islam, pesantren kilat pada bulan Ramadan, infak Jumat, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses internalisasi nilai-nilai Islam sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga membiasakan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari (Aini & Huda, 2023).

Di samping itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah berperan dalam menyusun program sekolah

berbasis karakter, melakukan supervisi akademik terhadap guru PAI, menyediakan sarana pembelajaran, serta membangun kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya sekolah yang religius dan mendukung pembentukan karakter peserta didik.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam merupakan proses penerapan berbagai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kepemimpinan kepala sekolah, dukungan orang tua, serta budaya sekolah yang mendukung proses pendidikan (Mulyasa, 2023).

Di Sekolah Menengah Pertama (SMP), implementasi kebijakan pendidikan Islam diwujudkan melalui pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran (student centered learning). Guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif mengamati, berdiskusi, memecahkan masalah, melakukan refleksi, serta menghubungkan materi keagamaan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Implementasi kebijakan tersebut juga terlihat pada penyusunan perangkat pembelajaran yang mengacu pada **Capaian Pembelajaran (CP)** dan **Tujuan Pembelajaran (TP)** dalam Kurikulum Merdeka. Guru diberi kebebasan menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, ketika membahas materi tentang **kejujuran**, guru tidak hanya menjelaskan dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memberikan studi kasus mengenai perilaku jujur dalam kehidupan sekolah, seperti tidak menyontek saat ujian, mengembalikan barang yang ditemukan, serta menyampaikan informasi secara benar. Peserta didik kemudian diminta berdiskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kejujuran sehingga mereka mampu memahami sekaligus menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Selain kegiatan intrakurikuler, implementasi kebijakan pendidikan Islam dilakukan melalui **pembiasaan budaya religius** di lingkungan sekolah. Pembiasaan tersebut meliputi membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, tadarus Al-Qur'an selama 10–15 menit sebelum pelajaran dimulai, pelaksanaan salat Dhuha dan salat Zuhur berjamaah, peringatan hari besar Islam, pesantren kilat pada bulan Ramadan, infak Jumat, serta kegiatan bakti sosial. Program-program tersebut bertujuan menanamkan nilai keimanan, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kebiasaan beribadah secara konsisten. Menurut Marzuki (2022), pembentukan karakter religius akan lebih efektif apabila dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan sekolah.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam juga diwujudkan melalui pengintegrasian **Profil Pelajar Pancasila** dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru mengembangkan kegiatan belajar yang mampu menumbuhkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sekaligus mengembangkan sikap gotong royong, kemandirian, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Misalnya, peserta didik diberikan proyek sosial berupa pengumpulan infak untuk membantu korban bencana alam, kemudian mereka diminta menyusun

laporan mengenai hikmah sedekah dan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan rasa empati terhadap masyarakat (Kemendikbudristek, 2022).

Perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti video edukatif, presentasi interaktif, aplikasi kuis daring (Quizizz atau Kahoot), Learning Management System (LMS), serta platform pembelajaran digital lainnya. Sebagai contoh, saat mempelajari materi tentang sejarah perkembangan Islam, guru menampilkan video dokumenter, kemudian peserta didik diminta menganalisis isi video dan menyampaikan hasil diskusi secara berkelompok. Penggunaan media digital mampu meningkatkan motivasi belajar, memperjelas materi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik (Suyitno, 2021).

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab menyusun program sekolah yang mendukung penguatan pendidikan karakter, melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran, memfasilitasi pelatihan guru, menyediakan sarana pembelajaran, serta menjalin kerja sama dengan komite sekolah dan orang tua. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan menciptakan budaya sekolah yang religius dan kondusif sehingga kebijakan pendidikan Islam dapat berjalan secara optimal (Mulyasa, 2023).

Di sisi lain, orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung implementasi pendidikan Islam. Sekolah secara berkala melakukan komunikasi dengan orang tua melalui rapat, pertemuan wali kelas, grup komunikasi digital, maupun kegiatan parenting. Melalui kerja sama tersebut, pembinaan akhlak peserta didik dapat dilakukan secara berkesinambungan antara lingkungan sekolah dan keluarga. Orang tua diharapkan melanjutkan pembiasaan yang telah diterapkan di sekolah, seperti membiasakan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, menjaga sopan santun, dan mengawasi penggunaan media digital di rumah (Aini & Huda, 2023).

Contoh Implementasi di SMP

Sebagai contoh implementasi kebijakan pendidikan Islam, sebuah SMP yang menerapkan Kurikulum Merdeka melaksanakan program **"Jumat Religi"** setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan membaca Surah Yasin secara bersama-sama, dilanjutkan kultum yang disampaikan secara bergiliran oleh peserta didik dengan bimbingan guru Pendidikan Agama Islam. Setelah itu, peserta didik mengumpulkan infak untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan diakhiri dengan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah sebagai bentuk penerapan ajaran Islam tentang kebersihan. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik, tetapi juga melatih keberanian berbicara di depan umum, kepedulian sosial, tanggung jawab, serta semangat gotong royong.

Contoh lainnya adalah pelaksanaan **projek pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning)** pada materi toleransi dalam Islam. Guru memberikan kasus mengenai keberagaman agama di lingkungan masyarakat, kemudian peserta didik berdiskusi untuk menemukan solusi berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas dan dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar menghargai perbedaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menerapkan ajaran Islam secara kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen, yaitu pemerintah, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Implementasi yang dilakukan

secara konsisten melalui pembelajaran yang inovatif, pembiasaan religius, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi semua pihak akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasi pendidikan Islam di SMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu problematika utama adalah masih terdapat guru Pendidikan Agama Islam yang belum sepenuhnya menguasai strategi pembelajaran inovatif dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru sehingga peserta didik kurang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri (Suyitno, 2021).

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti laboratorium keagamaan, perpustakaan yang lengkap, media pembelajaran digital, maupun akses internet yang stabil. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang menuntut penggunaan berbagai sumber belajar.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan yang cukup besar. Kemudahan akses internet memberikan dampak positif dalam memperoleh informasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang peserta didik mengakses konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan media sosial yang berlebihan, rendahnya literasi digital, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung dapat memengaruhi pembentukan karakter peserta didik apabila tidak diimbangi dengan pendidikan agama yang kuat (Marzuki, 2022).

Selain faktor internal sekolah, keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama anak juga masih menjadi persoalan. Sebagian orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada sekolah sehingga pembinaan karakter di lingkungan keluarga kurang optimal. Padahal, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak (Aini & Huda, 2023).

Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai problematika yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Problematika tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan masyarakat, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks (Mulyasa, 2023).

Salah satu permasalahan utama adalah **kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI)** yang belum merata. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program peningkatan kompetensi, masih terdapat guru yang menerapkan metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah secara dominan, sehingga peserta didik kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran PAI lebih berorientasi pada penguasaan materi daripada pembentukan karakter dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Suyitno, 2021).

Contoh: Dalam pembelajaran materi akhlak, guru hanya menjelaskan pengertian jujur, amanah, dan tanggung jawab tanpa memberikan kegiatan praktik, diskusi kasus, atau proyek yang memungkinkan peserta didik menerapkan nilai-nilai tersebut. Akibatnya, peserta didik memahami

konsep secara teoritis, tetapi belum mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan berikutnya adalah **keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan**. Tidak semua SMP memiliki musala yang memadai, perpustakaan dengan koleksi literatur keislaman yang lengkap, media pembelajaran digital, atau akses internet yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Padahal, Kurikulum Merdeka mendorong guru memanfaatkan berbagai sumber belajar agar proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, interaktif, dan menarik (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh: Di beberapa sekolah yang berada di daerah terpencil, guru PAI masih mengandalkan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar karena keterbatasan fasilitas teknologi. Akibatnya, peserta didik kurang memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.

Problematika lain yang cukup menonjol adalah **menurunnya motivasi belajar dan rendahnya minat peserta didik terhadap Pendidikan Agama Islam**. Sebagian peserta didik menganggap PAI hanya sebagai mata pelajaran yang berisi hafalan sehingga kurang menarik dibandingkan mata pelajaran lain. Rendahnya motivasi ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang kurang inovatif, minimnya media pembelajaran, serta kurangnya keterkaitan materi dengan kehidupan nyata peserta didik (Marzuki, 2022).

Contoh: Ketika guru hanya meminta peserta didik menghafal ayat atau hadis tanpa menjelaskan makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik cenderung cepat merasa bosan dan kurang memahami nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, **perkembangan teknologi informasi dan media sosial** menjadi tantangan besar dalam pendidikan Islam. Kemudahan akses terhadap internet memberikan manfaat sebagai sumber belajar, tetapi juga membuka peluang bagi peserta didik untuk mengakses konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), pornografi, kekerasan, hingga penyebaran informasi yang tidak benar (*hoaks*). Apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi digital dan pendidikan karakter, kondisi tersebut dapat memengaruhi perilaku serta perkembangan moral peserta didik (Marzuki, 2022).

Contoh: Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial daripada membaca Al-Qur'an atau mengulang pelajaran. Bahkan, beberapa peserta didik mudah terpengaruh oleh konten negatif yang beredar di internet sehingga berdampak pada sikap dan perilaku mereka di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Problematika berikutnya adalah **kurangnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat** dalam pembinaan karakter keagamaan peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI, tetapi juga memerlukan dukungan orang tua dan lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, masih terdapat orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada sekolah sehingga pembiasaan ibadah dan pembentukan akhlak di rumah belum berjalan secara optimal (Aini & Huda, 2023).

Contoh: Sekolah membiasakan peserta didik melaksanakan salat Zuhur berjamaah dan membaca Al-Qur'an setiap pagi, tetapi kebiasaan tersebut tidak dilanjutkan di rumah karena kurangnya pengawasan dan pembiasaan dari orang tua. Akibatnya, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah tidak berkembang secara maksimal.

Di samping itu, **pengaruh lingkungan pergaulan** juga menjadi salah satu problematika pendidikan Islam di SMP. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri sehingga peserta didik mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Apabila lingkungan pergaulan kurang kondusif, peserta

didik berpotensi terlibat dalam perilaku negatif, seperti membolos, merokok, berkata kasar, perundungan (*bullying*), atau tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, religius, dan kondusif agar peserta didik memperoleh teladan yang baik (Mulyasa, 2023).

Contoh: Beberapa sekolah masih menghadapi kasus perundungan antarpeserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ukhuwah, kasih sayang, dan saling menghormati yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku peserta didik.

Permasalahan lainnya adalah **evaluasi pembelajaran PAI yang masih berorientasi pada aspek kognitif**. Penilaian sering kali lebih menekankan hasil tes tertulis dibandingkan penilaian terhadap sikap, akhlak, kebiasaan beribadah, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, keberhasilan peserta didik lebih banyak diukur dari nilai akademik daripada perubahan perilaku dan karakter (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh: Peserta didik memperoleh nilai tinggi pada mata pelajaran PAI, tetapi masih sering terlambat, kurang disiplin, atau belum menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran agama belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku nyata peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama bersifat multidimensional karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari kompetensi guru, fasilitas pendidikan, motivasi belajar peserta didik, perkembangan teknologi, lingkungan keluarga, hingga sistem evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pendidikan Islam di SMP diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan moral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai ajaran Islam.

Upaya Mengatasi Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di SMP.

1. Pertama, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, seminar, dan program pengembangan profesi berkelanjutan agar guru mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif serta memanfaatkan teknologi secara efektif.
2. Kedua, sekolah perlu mengembangkan budaya religius melalui pembiasaan ibadah, pembinaan akhlak, kegiatan keagamaan, serta pemberian keteladanan oleh seluruh warga sekolah. Budaya sekolah yang positif akan memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan peserta didik.
3. Ketiga, perlu adanya penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua akan membantu memantau perkembangan karakter peserta didik sehingga pembinaan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah.
4. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, memperluas akses terhadap media pembelajaran digital, serta memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di sekolah. Dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, implementasi pendidikan Islam di SMP diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter Islami, memiliki kecakapan abad ke-21, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

Berbagai problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memerlukan upaya penyelesaian yang komprehensif

dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal (Mulyasa, 2023).

Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, seminar, lokakarya (*workshop*), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, guru diharapkan mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan teknologi digital, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta melakukan asesmen yang komprehensif terhadap perkembangan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh: Guru mengikuti pelatihan mengenai pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) kemudian menerapkannya pada materi zakat dengan mengajak peserta didik membuat program penggalangan donasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami konsep zakat, tetapi juga mempraktikkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata.

Mengembangkan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Kontekstual

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu dirancang agar lebih menarik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran seperti *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, *Discovery Learning*, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, maupun pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran yang kontekstual akan membantu peserta didik memahami keterkaitan antara materi agama dengan kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai Islam lebih mudah diinternalisasikan (Mulyasa, 2023).

Contoh: Pada materi kejujuran, guru menyajikan kasus mengenai perilaku menyontek saat ujian. Peserta didik diminta menganalisis kasus tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, kemudian mendiskusikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Memperkuat Budaya Religius di Sekolah

Budaya religius merupakan salah satu strategi efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Sekolah dapat membiasakan kegiatan keagamaan secara rutin, seperti membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai, salat Dhuha dan salat Zuhur berjamaah, kultum, infak Jumat, peringatan hari besar Islam, pesantren kilat, serta kegiatan sosial yang menanamkan nilai kepedulian terhadap sesama. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter religius dan akhlak mulia peserta didik (Marzuki, 2022).

Contoh: Setiap hari Jumat sekolah melaksanakan program **Jumat Religi**, yang terdiri atas tadarus Al-Qur'an, kultum oleh peserta didik, pengumpulan infak, dan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Program ini melatih peserta didik menjadi pribadi yang religius, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab.

Meningkatkan Kerja Sama antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada pembelajaran di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua melalui pertemuan rutin, program *parenting*, grup komunikasi digital, maupun konsultasi perkembangan peserta didik. Sinergi

tersebut akan memperkuat pembinaan akhlak dan kebiasaan beribadah baik di sekolah maupun di rumah (Aini & Huda, 2023).

Contoh: Sekolah memberikan buku pemantauan ibadah harian yang diisi oleh peserta didik dan ditandatangani oleh orang tua. Buku tersebut memuat kegiatan seperti salat lima waktu, membaca Al-Qur'an, berdoa, serta membantu orang tua di rumah. Guru kemudian melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan peserta didik.

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital perlu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang positif. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, aplikasi kuis interaktif, platform pembelajaran daring, serta berbagai media digital lainnya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Di sisi lain, sekolah juga perlu memberikan edukasi mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh: Guru menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengevaluasi materi akhlak terpuji, kemudian mengajak peserta didik berdiskusi mengenai cara menyaring informasi di media sosial agar terhindar dari penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan konten negatif.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pemerintah bersama sekolah perlu menyediakan fasilitas yang memadai, seperti musala, perpustakaan, koleksi literatur keislaman, perangkat teknologi informasi, jaringan internet, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Fasilitas yang memadai akan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendukung implementasi Kurikulum Merdeka (Mulyasa, 2023).

Contoh: Sekolah menyediakan perpustakaan digital yang berisi Al-Qur'an digital, buku-buku keislaman, video edukasi, dan jurnal ilmiah sehingga peserta didik memiliki sumber belajar yang lebih beragam dan mudah diakses.

Melakukan Evaluasi Pembelajaran secara Komprehensif

Evaluasi Pendidikan Agama Islam hendaknya tidak hanya menilai aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga aspek sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Guru dapat menggunakan observasi, jurnal sikap, penilaian proyek, portofolio, unjuk kerja, serta penilaian diri (*self assessment*) untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari nilai ujian, tetapi juga dari perubahan perilaku dan pembiasaan akhlak mulia (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh: Selain memberikan tes tertulis tentang materi salat, guru juga mengamati keterampilan peserta didik dalam melaksanakan gerakan dan bacaan salat secara benar, sekaligus menilai kedisiplinan mereka dalam mengikuti salat berjamaah di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi problematika pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas guru, pengembangan pembelajaran yang inovatif, penguatan budaya religius, optimalisasi teknologi digital, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, evaluasi pembelajaran yang menyeluruh, serta penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi pendidikan Islam di SMP diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan moral sehingga siap menghadapi tantangan kehidupan di era global tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

Peran Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai problematika pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menjadi pedoman bagi pemerintah, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat dalam melaksanakan proses pendidikan secara terarah. Melalui kebijakan yang tepat, berbagai kendala yang muncul dalam implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diminimalkan sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Salah satu peran utama kebijakan adalah **menjamin terselenggaranya Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib** pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sebagai bagian dari pembentukan karakter dan akhlak mulia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Peran kebijakan berikutnya adalah **meningkatkan kualitas pembelajaran melalui implementasi Kurikulum Merdeka**. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan berbagai metode inovatif, serta mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang selama ini cenderung berorientasi pada hafalan menjadi pembelajaran yang lebih kontekstual, aktif, dan bermakna (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Selain itu, kebijakan pemerintah juga berperan dalam **meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam**. Melalui berbagai program seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, menarik, serta mampu membentuk karakter religius peserta didik secara lebih efektif (Mulyasa, 2023).

Kebijakan pendidikan juga berperan dalam **penguatan pendidikan karakter** melalui integrasi nilai-nilai agama ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Pemerintah mendorong setiap satuan pendidikan untuk membangun budaya religius melalui pembiasaan ibadah, pembacaan Al-Qur'an, salat berjamaah, peringatan hari besar Islam, kegiatan sosial, dan keteladanan guru. Kebijakan ini bertujuan agar pendidikan agama tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan ajaran Islam (Marzuki, 2022).

Di era digital, kebijakan pendidikan juga memiliki peran penting dalam **mendorong pemanfaatan teknologi secara positif**. Pemerintah menyediakan berbagai platform pembelajaran digital, pelatihan literasi digital bagi guru, serta mendorong penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik sekaligus membimbing mereka agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kemendikbudristek, 2022).

Kebijakan juga berfungsi untuk **meningkatkan pemerataan mutu pendidikan** melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan sekolah terhadap ruang belajar yang layak, musala, perpustakaan, media pembelajaran, perangkat teknologi informasi, serta akses internet. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya (Mulyasa, 2023).

Selain pemerintah, kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab menyusun program kerja yang mendukung pendidikan karakter, melakukan supervisi akademik terhadap guru, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan keagamaan, serta membangun kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam di sekolah (Aini & Huda, 2023).

Contoh Peran Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan Islam

Sebagai contoh, sebuah SMP menghadapi permasalahan rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam melaksanakan salat berjamaah. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan penguatan pendidikan karakter, sekolah menetapkan program **"Sekolah Religius"** yang meliputi tadarus Al-Qur'an setiap pagi, salat Dhuha dan Zuhur berjamaah, kultum mingguan, serta pemberian penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan keteladanan dalam beribadah. Setelah program tersebut diterapkan secara konsisten dengan dukungan guru dan orang tua, kedisiplinan serta partisipasi peserta didik dalam kegiatan keagamaan mengalami peningkatan.

Contoh lain adalah ketika guru mengalami kesulitan menerapkan Kurikulum Merdeka. Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan implementasi kurikulum, penyusunan modul ajar, serta penggunaan media pembelajaran digital. Setelah mengikuti pelatihan, guru mulai menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) sehingga peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu menghubungkan materi Pendidikan Agama Islam dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi problematika pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama. Kebijakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan karakter, mendorong inovasi pembelajaran, menyediakan sarana dan prasarana, serta membangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Implementasi kebijakan yang konsisten, didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, akan berkontribusi pada terwujudnya pendidikan Islam yang berkualitas dan mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan pendidikan karakter, serta berbagai program pembiasaan religius

di lingkungan sekolah. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di SMP masih menghadapi berbagai problematika. Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya motivasi belajar sebagian peserta didik, pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media sosial, serta belum optimalnya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembinaan karakter keagamaan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya di setiap satuan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di SMP melalui pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan budaya religius di sekolah, serta peningkatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dengan sinergi tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, karakter religius, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., & Huda, M. (2023). Implementasi pendidikan agama Islam dalam penguatan karakter peserta didik di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 115–128.

Arifin, Z. (2022). *Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Kemendikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Marzuki. (2022). Pendidikan karakter Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45–58.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Bumi Aksara.

Musfah, J. (2021). *Manajemen pendidikan: Teori, kebijakan, dan praktik*. Jakarta: Kencana.

Nata, A. (2020). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyitno. (2021). Problematika pendidikan agama Islam di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 34–49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.

Wibowo, A. (2021). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, M. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah. *Jurnal Tarbawi*, 7(2), 87–101.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nurhalizah, T., Meliana, S., Dedih, U., & Erihadiana, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat kelas 7 dalam meningkatkan kognitif siswa pada mata pelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3783–3794.

Misniati, & Fitriani, W. (2023). Landasan pengembangan Kurikulum Merdeka dan urgensinya pada pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).